

BAB IV

UPAYA IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DI INDONESIA

Dalam mengimplementasikan SDGs, Indonesia membutuhkan berbagai upaya dalam mewujudkannya. Upaya-upaya tersebut tidak hanya untuk berjangka pendek namun upaya-upaya tersebut juga berjangka panjang. Pembangunan membutuhkan sebuah komitmen bersama oleh seluruh manusia agar pembangunan tersebut tidak merugikan generasi yang akan datang. Oleh karena itu pada bab IV ini berisikan upaya-upaya Indonesia diantara dengan pendekatan pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, kerangka hukum pelaksanaan SDGs, peran daerah dalam mengimplementasikan SDGs dan hambatan ataupun tantangan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

A. Pembangunan Manusia

Pada era Presiden Joko Widodo berbagai kebijakan-kebijakan diarahkan fokus kepada pembangunan manusia. Ada 4 dimensi pembangunan manusia pada era ini yakni pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter. Hal ini juga selaras bagi pemerintah dalam menggunakan pendekatan pembangunan manusia atau teori *people centered development* sebagai pendekatan untuk melaksanakan pencapaian SDGs di Indonesia. Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menggugat subordinasi mereka melalui organisasi-organisasi lokal secara *bottom-up*. Organisasi yang dianggap paling efektif adalah organisasi yang bermula dengan kebutuhan praktis masyarakat yang konkrit dan berkaitan dengan persoalan

kesehatan, ketenagakerjaan dan penyediaan pelayanan dasar. Dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat mengkategorikan kebutuhan praktis dan strategis melalui pemberdayaan atau penguatan diri masyarakat. Oleh karena itu penting kiranya melakukan kategorisasi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat untuk menghindari waktu sebagai determinan perubahan, karena perubahan jangka pendek belum menjamin transformasi jangka panjang dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat tidak secara otomatis berarti terpenuhinya kebutuhan strategis masyarakat. (Hikmat Harry, 2014)

Kebutuhan praktis yang dimaksud yaitu berbagai kebutuhan dasar manusia. Sementara itu, kebutuhan strategis mencakup kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hak-hak individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Usaha untuk memenuhi kebutuhan strategis tersebut adalah wilayah pekerjaan sosial yang selama ini diyakini sebagai suatu profesi yang memiliki kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.

Perubahan hukum, aturan kemasyarakatan, sistem hak milik, dan kontrol atas masyarakat, aturan perburuhan, institusi sosial dan legal yang melindungi kontrol sosial masyarakat merupakan hal yang sangat penting jika ingin memperoleh keadilan dalam suatu tatanan sosial politik tertentu. Dalam cara mencapai kebutuhan-kebutuhan itulah, pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat melalui strategi pemberdayaan secara mendasar sangat berbeda dengan pendekatan-pendekatan pembangunan yang lain. Pembangunan ini berupaya untuk mencapai kebutuhan strategis masyarakat secara tidak langsung melalui kebutuhan praktis masyarakat, dengan

menghindari pertentangan secara langsung dengan membangun kebutuhan praktis masyarakat sebagai basis untuk membangun landasan yang kuat sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan strategis. (Hikmat Harry,2014)

Kebijakan-kebijakan pemerintah Joko Widodo lainnya dalam mendorong melakukan pembangunan masyarakat dan selaras dengan SDGs diantaranya adalah mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu dan mengembangkan kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Kebijakan ini diperuntukkan untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kehidupan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal. Yang mana pada poin pengentasan kemiskinan pemerintahan Joko Widodo menekankan pada aspek pendekatan-pendekatan yang mengutamakan memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat.

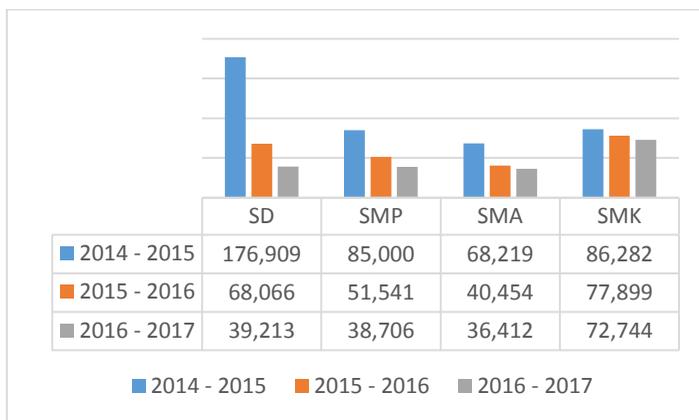
Dalam bidang pendidikan, kebijakan Joko Widodo tertumpu pada diantaranya, melaksanakan wajib belajar 12 tahun, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan, memperkuat jaminan kualitas pelayanan pendidikan, meningkatkan akses pemerataan pendidikan tinggi, memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya serta meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi. Pelaksanaa kebijakan ini dapat dilihat dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia pintar merupakan salah satu program andalan Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas anak-anak Indonesia. Program ini berupa pemberian bantuan tunai pendidikan

kepada seluruh anak usia sekolah yang menerima KIP atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan. Tujuan dari adanya program ini adalah menghilangkan hambatan anak secara ekonomi dalam bersekolah, mencegah anak putus sekolah, membantu anak kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran dan mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan universal. KIP ini memberikan santunan sebesar Rp. 225.000 - Rp. 500.000 sesuai dengan tingkatan sekolah. (www.tnp2k.go.id, 2015)

Dengan pemberian kartu Indonesia Pintar saat ini angka putus sekolah di Indonesia mengalami penurunan pada tiap tingkatan dari tahun ketahun. Data tersebut dapat dilihat pada grafik 4.1.

Grafik 4.1 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Tingkatan dari 2014-2017



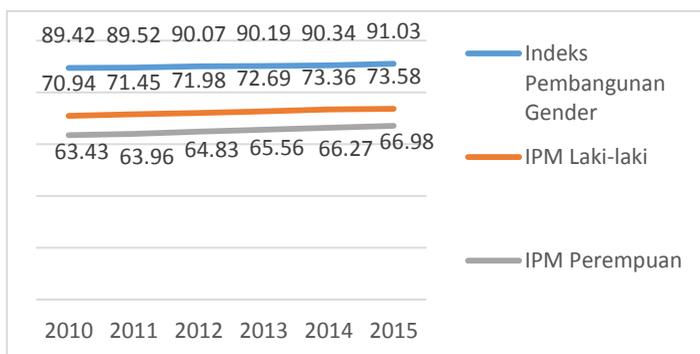
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017)

Berdasarkan pada tabel diatas bahwasanya angka putus sekolah di Indonesia semakin menurun dari setiap tahunnya. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies Philips Jusario Vermonte mengapresiasi program Indonesia Pintar dikarenakan melalui program ini anak-anak Indonesia ada komponen kebutuhan keluarga yang di ambil oleh negara yaitu pendidikan. Sebelumnya masyarakat belum kelas ekonomi bawah belum punya akses yang baik terhadap kebutuhan tersebut dan hal ini langsung dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah dan terutama daerah luar jawa. (Wiangga, 2017) namun hal ini berbanding terbalik dengan data yang dikeluarkan oleh Unicef pada tahun 2016. Pada tahun tersebut sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat melanjutkan pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini dikarenakan faktor kemiskinan yang menambah jumlah angka anak tidak bersekolah. Ujar Peneliti PSKK UGM, Triyastuti Setianingrum. (CPPS, 2017) dan distribusi KIP yang tidak merata membuat program pendidikan Jokowi tidak terjangkau dan belum dirasakan secara maksimal (Kompas,2017)

Kesetaraan gender adalah pendorong utama pembangunan berkelanjutan dikarenakan poin ini adalah salah satu komitmen global dalam pembangunan manusia. Dalam bidang kesetaraan gender Presiden Joko Widodo menandakan peran perempuan dalam berpolitik hal ini dapat dilihat dengan kebijakan-kebijakannya yakni meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan, menekankan peran perempuan di bidang politik dan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender. Penekanan pada kesetaraan gender juga berpatokan pada strategi dalam pembangunan pembangunan yang berpusat pada

rakyat yang mana tujuan akhirnya adalah memperbaiki seluruh kehidupan masyarakat dan melibatkan semua masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan. perkembangan Indeks Pembangunan Gender dapat dilihat pada grafik 4.2

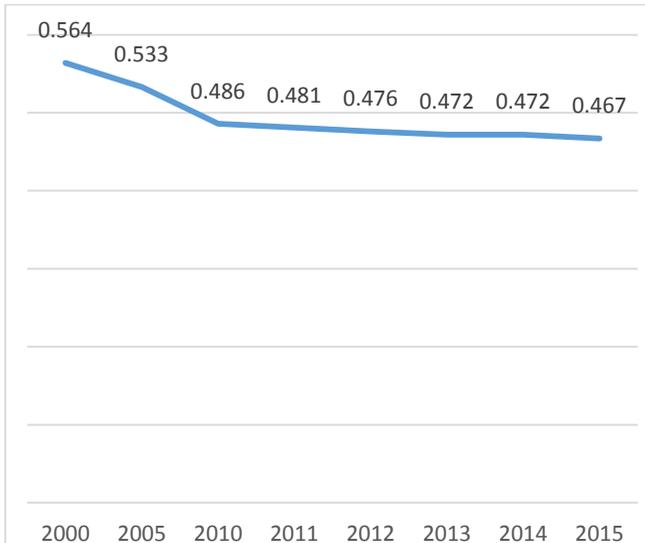
Grafik 4.2 Indeks Pembangunan Gender Indonesia Tahun 2010 - 2015



Sumber : diolah dari data BPS (2017)

Dengan melihat data diatas menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara indeks pembangunan laki-laki dan indeks pembangunan perempuan. Jika melihat dari angka indeks pembangunan gender, Indonesia menunjukkan peningkatan yang baik walaupun kurang signifikan. Namun hal tersebut memberikan kesan positif bahwa ketimpangan gender semakin berkurang. Indikator *Gender Inequality Indeks* (GII) juga memberikan gambaran serupa, dengan perkembangan GII di Indonesia menunjukkan ketimpangan gender semakin kecil. Selama 15 tahun GII Indonesia turun dari 0,564 pada tahun 2000 menjadi 0,467 pada tahun 2014. Semakin kecil angka GII maka semakin kecil ketimpangan gender yang terjadi.

**Grafik 4.3 Angka Gender Inequality Indeks (GII)
Indonesia Tahun 2000 – 2015**

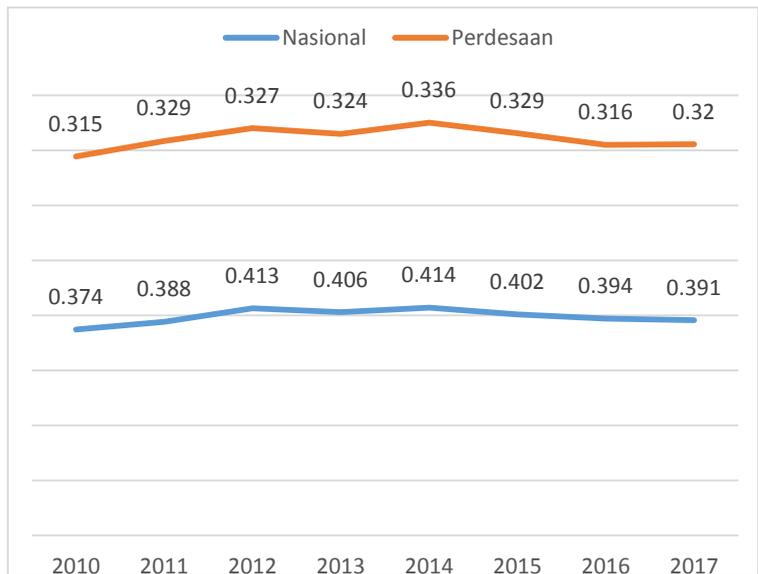


Sumber : diolah dari data BPS (2017)

Secara politik sosial kultural Presiden Joko Widodo melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat perdesaan pemerintah Joko Widodo mempunyai program prioritas yakni melalui UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang mana dalam UU ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik perdesaan namun juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya regulasi ini membuat masyarakat desa lebih mandiri dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, tujuan ini selaras

dengan poin SDGs ke 10 yakni mengurangi kesenjangan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan, tetapi juga harkat dan martabat, masyarakat serta terpeliharanya tatanan budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya. Berikut data *Indeks Gini Ratio* yang memperlihatkan angka kesenjangan ekonomi antara nasional dan perdesaan pada grafik 4.4

Grafik 4.4 Indeks Gini Ratio Indonesia tahun 2010 – 2017



Sumber: diolah dari data BPS (2017)

Berdasarkan data diatas menunjukkan angka penurunan *Indeks Gini Ratio* di Indonesia setiap

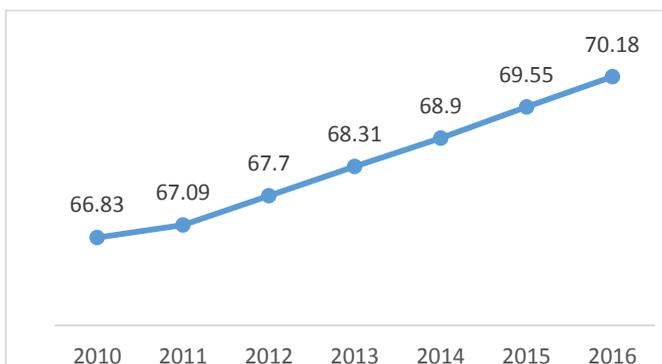
tahunnya di era Pemerintahan Jokowi secara nasional. Namun ketimpangan pada perdesaan menunjukkan peningkatan pada tahun 2017 yakni sejumlah 0,320 % naik 0,04% dari tahun 2016. Selain menggunakan *Gini Ratio* perhitungan ketimpangan dapat dilihat dari persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Dalam hal ini secara nasional pada tahun 2017 persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,22 persen yang berarti berkategori ketimpangan rendah. Presentase ini naik lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 17,11 persen. Jika dibandingkan menurut daerah, pada September 2017 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 16,33 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 20,25 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia maka daerah perkotaan termasuk ketimpangan sedang sementara perdesaan termasuk ketimpangan rendah. (BPS,2018)

Pembangunan masyarakat juga pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk seluruh masyarakat, oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Pembangunan masyarakat dilakukan dengan pendekatan multisektor (holistik), partisipatif, berdasarkan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergis sehingga tercapai secara optimal (Zamhariri,2008)

Dengan melakukan pendekatan pada pembangunan manusia Indonesia berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan manusia dari

tahun ketahun. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada grafik 4.5 dibawah ini

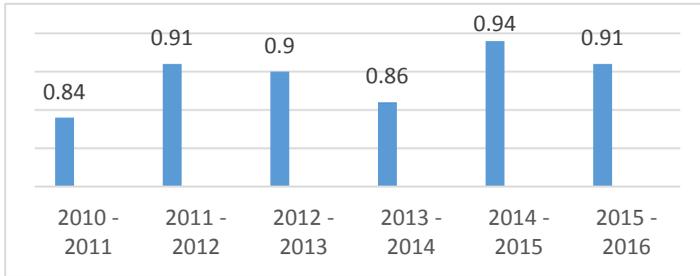
Grafik 4.5 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2010 - 2016



Sumber : diolah dari data BPS (2017)

Pertumbuhan indeks pembangunan di Indonesia mencapai angka 70,18% pada tahun 2016 dan angka tersebut tumbuh 0,91 %. Angka-angka peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia ini menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya . Adapun pertumbuhan IPM dapat dilihat pada grafik 4.6 dibawah ini.

Grafik 4.6 Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2010 - 2016



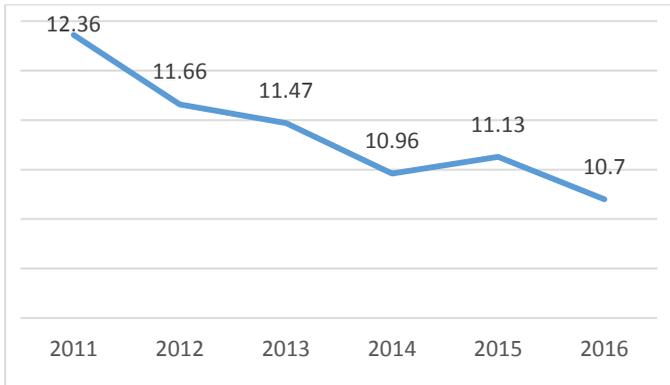
Sumber : diolah dari data BPS (2017)

Atas pencapaian IPM yang semakin meningkat setiap tahunnya Indonesia menjadi negara dengan kategori *high human development* serta menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia secara umum di Indonesia. Pengukuran pembangunan manusia menggunakan indikator yang telah ditentukan oleh UNDP. Pengukuran tersebut menggunakan tiga dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut diturunkan menjadi 4 indikator yang digunakan yakni angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. (BPS, 2017).

Dengan naiknya nilai IPM dan turunnya Indeks Gini berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Dimana pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 %. Sedangkan selama periode 2015-2016 tingkat kemiskinan Indonesia menurun menjadi 11,13 % di tahun 2015, menjadi 10,70 ditahun 2016. (Machmudin, 2016). County Director UNDP Indonesia Christophe Bahuët mengatakan bahwa IPM untuk Indonesia menunjukkan kemajuan-kemajuan yang dicapai. langkah selanjutnya menuju pembangunan manusia yang tinggi adalah inklusi dan pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan serta provinsi-provinsi terpencil.

(id.undp.org, 2017). Grafik 4.7 tren penurunan kemiskinan diIndonesia

Grafik 4. 7 Angka Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011 – 2016



Sumber : diolah dari data BPS (2017)

Dari data - data diatas menurut laporan yang diliris oleh Selim Jahan menyatakan bahwa meskipun terjadi penurunan kemiskinan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan, masih terdapat 140 juta warga yang hidup kurang dari Rp.20.000 perhari. Dengan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia untuk 2016 sebesar 70,18 % dan menempatkan sebagai negara dengan kategori pertumbuhan IPM tinggi namun IPM Indonesia menurun tajam ke 0,563 bila kesenjangan diperhitungkan. Kesenjangan pendidikan dan harapan hidup saat lahir di Indonesia lebih tinggi daripada rata-rata di Asia timur dan negara-negara Pasifik. (id.undp.org, 2017)

Pada tahun 2017 SDSN (*Sustainable Development Solution Network*) mengeluarkan indeks pelaksanaan SDGs dimasing-masing negara yang disebut dengan SDGs Index and Dashboards Reports. Menurut lembaga yang dipimpin oleh Jeffrey Sachs tersebut bahwa peringkat Indonesia turun dari urutan ke 98 dari 149 negara pada tahun 2016 menjadi

peringkat ke 100 dari 157 negara pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan bahwa dari awal tidak ada kebijakan atau program baru dari pemerintahan yang menunjukkan Indonesia serius melaksanakan SDGs, semuanya baru sebatas *business as usual*. Dari 169 indikator SDGs yang diadopsi pemerintah kedalam RPJMN hanya sekitar 13,7 % yang sesuai dengan indikator global SDGs. selebihnya, dilakukan pendekatan *proxy* yang belum tentu tepat mampu mengukur pencapaian SDGs. ujar Donny Ardyanto, Program Adviser Yayasan TIFA

B. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam. begitupula dengan pembangunan ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan akan mengakibatkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan. Perbedaan kepentingan tujuan pembangunan secara nyata telah menimbulkan konflik kepentingan anantara tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan tujuan pelestarian lingkungan baik lingkungan sosial masyarakat ataupun lingkungan alam. (Syadullah, 2010)

Pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan hanya akan bersifat eksploitatif dan berdimensi jangka pendek. Sementara pembangunan nasional harus berorientasi jangka panjang atau biasa disebut dengan pembangunan berkelanjutan agar selaras,serasi dan seimbang antara 3 pilar utama pembangunan yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan ketiga faktor tersebut terutama pada ekonomi. (Hemawan, 2010). Pembangunan ekonomi

tidak hanya membuat kemakmuran akan meningkat tetapi juga akan meningkatkan kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa pembangunan bukan hanya semata untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tetapi harus ditujukan pada efisiensi biaya dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan ekologis bangsa. Pembangunan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dan diharapkan kehidupan makhluk lainnya termasuk keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta stabilitas dan integritas semakin terjaga. (Abdoellah, 2017)

Di Indonesia konsep pembangunan berkelanjutan telah diamanatkan oleh konstitusi. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konferensi PBB tentang lingkungan hidup 1972 dan KTT Bumi pada tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan ekonomi serta KTT pembangunan berkelanjutan pada tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang dikarenakan oleh produksi industri yang berlebihan dan pembangunan yang berorientasi ekonomi konvensional. (Djajadiningrat, 2011)

Selain menggiatkan kembali pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kualitas pembangunan indonesia mengacu pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan modal manusia, modal masyarakat dan modal alam. Peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dapat berkelanjutan jika dibarengi oleh peningkatan modal manusia, modal masyarakat dan modal alam secara keseluruhan dan integratif. (Djajadiningrat, 2011)

Dari fokus ekonomi tersebut maka lahirilah kebijakan-kebijakan untuk mewujudkannya diantara adalah pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan daya saing tenaga kerja dan membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan. Yang mana pemerintah Jokowi mengencangkan pembangunan ekonomi mikro berbasis UMKM dan mendorong agar masyarakat Indonesia untuk memperhatikan peluang dari ekonomi kreatif serta membangun pusat pelatihan tenaga kerja melalui balai kerja yang tersebar diberbagai daerah dan teintegrasi.

Pada pembangunan ekonomi yang inklusif pada dalam mengurangi disparitas antar wilayah pemerintah Jokowi terus menerus menekankan pembangunan yang merata antar wilayah dengan pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal dan menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah. Hal ini bisa dilihat dengan upaya presiden dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan tertinggal seperti diperbatasan papua dan kalimantan. Pembangunan ekonomi yang inklusif ini sangat diharapkan tidak hanya berdampak pada manusia namun juga berdampak pada alam sekitarnya.

Dengan begitu kebijakan-kebijakan ini mengarah kepada suatu pendekatan pembangunan yang mana disebut dengan *green economy*. *green economy* merupakan visi yang meninggalkan praktek ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek dan berdampak negatif pada lingkungan, menjadi praktek ekonomi yang ramah lingkungan (*environment sound economy*) dengan demikian bahwa dipastikan bahwa Indonesia menjadi negara yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus

mengorbankan kemampuan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. (Syadullah, 2010)

Green economy adalah sebuah model ekonomi baru yang berkembang dengan pesat dan bertolak belakang dengan pendekatan ekonomi konvensional. *Green economy* didasarkan pada pengetahuan *ecological economics* yang membahas ketergantungan manusia secara ekonomis terhadap ekosistem alam dan akibat dari efek aktivitas ekonomi manusia terhadap *climate changes* dan *global warning*. (Syadullah, 2010)

Melihat aktivitas ekonomi manusia yang bersinggungan dengan perubahan iklim maka Indonesia berfokus pada pembangunan lingkungan mencerminkan pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Fokus-fokus tersebut melahirkan kebijakan yakni penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan kebencanaan. Dalam kaitan dengan perubahan iklim, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak diwajibkan menentukan target penurunan emisi gas secara kuantitatif.. (RPJMN,2014)

Penyusunan neraca terintegrasi ekonomi - lingkungan memungkinkan menelaah aspek keberlanjutan (sustainability) sumber daya alam kita. Tabel berikut ini mensarikan nilai kekayaan nasional dirinci menurut nilai aset barang modal tetap (produced asset) dan nilai (sebagian) kekayaan alam (non-produced asset) yang dicuplik dari hasil penghitungan neraca aset sumber daya alam.

Tabel 4.1 Nilai Aset Nasional Tahun 2012-2016

Tahun	Nilai Aset di Akhir Tahun (Miliar Rp)	Presentase Terhadap Total
-------	---------------------------------------	---------------------------

			Aset	
	Di Produksi	Aset Alam	Diproduksi	Aset Alam
2012	16.679.560	20.322.231	45%	55%
2013	19.731.056	30.378.615	39%	61%
2014	23.167.980	77.688.685	23%	77%
2015	26.950.123	31.312.466	46%	54%
2016	30.990.621	31.312.466	50%	50%

Sumber : Data diolah dari BPS (2017)

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa sumber daya alam diIndonesia mempunyai relatif besar peranannya terhadap aset nasional. selama periode 2012-2016 peranan aset alam berkisar antara 50 -77 % terhadap total aset nasional. hal ini menunjukkan kekayaan nasional kita sebagian besar berasal dari aset alam. Oleh karena itu melihat besaran peranan kekayaan alam indonesia dalam pembentukan total kekayaan nasional maka kiranya penting dalam menjaga keutuhan tersebut.

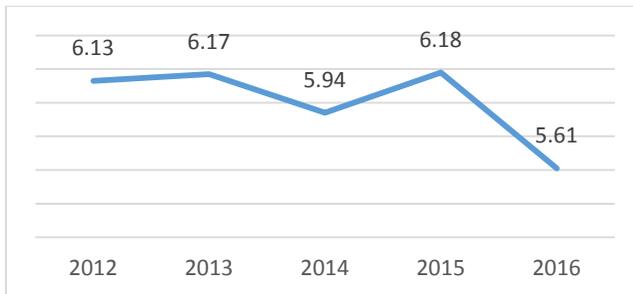
Dalam konteks Indonesia penerapan *green economy*. Kebijakan-kebijakan yang disebut diatas harus ditunjang dengan perangkat-perangkat dalam menjamin keberhasilannya. Sebagai dasar pengembangan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Indonesia melakukan melalui aplikasi *green budgeting* untuk menata kelola keuangan dan anggaran pemerintah. Implementasi dari *green budgeting* antara lain melalui penerapan *green procurement* pada kebijakan publik. *green budgeting* ini sendiri adalah paradigma penganggaran yang memprioritaskan unsur kelestarian lingkungan dalam penyusunannya, implementasi, pengawasan, sampai dengan evaluasi dalam belanja pemerintah dan juga pendapatan yang mendukungnya. Ini bisa kita lihat pada anggaran kementerian Lingkungan hidup yang selalu meningkat setiap tahunnya, pada 2016 anggaran sekitar Rp. 5,76 Triliun, pada 2017 sekitar Rp. 6,77

Triliun dan tahun pada 2018 naik menjadi Rp. 8.01 Triliun (Sugianto, 2017).

Untuk mendukung pembangunan nasional yang bersifat *pro-growth, pro-poor, pro-job*, tersebut dilaksanakan konsep *green economy*. Pendekatan *pro-green* atau pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah upaya untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan alami dan seminim mungkin melakukan penebangan tanaman guna menjaga, memelihara dan mempertahankan sumber daya alam serta menekan emisi karbon serendah mungkin. (Mustopadidjaja AR, 2012) .

Pendekatan *green economy* yang mana pada awalnya diproyeksikan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia namun pada kenyataannya saat ini pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.8

Grafik 4.8 Angka Pengangguran di Indonesia Tahun 2012 – 2016



Sumber : diolah dari data BPS (2017)

Dari data diatas menunjukkan bahwa *green economy* belum dapat secara signifikan mengurangi

penggangguran di Indonesia. dan juga diperparah dengan kondisi lingkungan Indonesia yang semakin rusak yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi di Indonesia. sebagaimana yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LKH Witono menyatakan bahwa 75% air sungai di Indonesia dicemari oleh limbah berat yang berasal dari limbah komestik dan Industri. (Putra, 2017)

Kerusakan-kerusakan lingkungan lainnya seperti, penambangan ilegal,kebakaran hutan serta meningkatnya emisi karbon di Indonesia. mengindikasikan bahwa *green economy* sulit untuk diterapkan di Indonesia. hal ini seperti yang dikemukakan oleh Heru Prasetyo bahwa Undang-Undang tidak memberikan jalan untuk *green economy*. Termasuk perundangan yang ada dibawahnya seperti Perpres,Permen dan Perda. Ia menambahkan adanya saling timpang tindih peraturan lama yang cenderung eksploitatif pada alam dan kurang mendukung *green economy*. Namun sebaliknya peraturan baru mulai mengarah untuk ramah lingkungan dan membuat kebingungan para penegak hukum ketika diterapkan di lapangan (Zakiya, 2012)

C. Perpres sebagai Kerangka Hukum Pelaksanaan SDGs

Di Indonesia istilah SDGs dikenal dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang disebut dengan TPB. TPB yang dimaksud adalah bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

(Zaenal, 2017). Ini merupakan terjemahan pengertian SDGs kedalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil antusias menantikan SDGs dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan pertemuan antara Koalisi Masyarakat Sipil dengan presiden. Dalam kesempatan tersebut Koalisi Masyarakat Sipil dalam kaitannya implementasi SDGs di Indonesia menuntut 3 hal kepada presiden yakni, pertama menuntut pemerintah menyusun payung hukum untuk pelaksanaan SDGs. Kedua menuntut pemerintah untuk menyusun rencana aksi nasional bagi pelaksanaan SDGs. Ketiga menuntut pemerintah untuk membentuk panitia bersama bagi pelaksanaan SDGs. Tuntutan ini merujuk pada kegagalan pelaksanaan MDGs di Indonesia sehingga dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat . (Panuluh dan Fitri,2016)

Dengan pertimbangan tersebut dan memenuhi komitmen politik pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017 presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* untuk mengakhiri kemiskinan,meningkatkan kesehatan kerja, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. (Zaenal, 2017). Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hamong Santono, Senior Officer SDGs INFID bahwa komitmen politik ini berupaya mendorong keterlibatan aktor pemerintah, swasta,NGO dan stakeholder lainnya sebagaimana dalam pembangunan nasional.

Penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh presiden Joko Widodo membuktikan bahwa adanya komitmen politik dari pemerintah Joko Widodo secara serius melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan sebagai upaya untuk melaksanakan TPB secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak, baik NGO, universitas dan pemangku kebijakan lainnya. (Ardianto dan Santono,2017). hal ini sesuai dengan pernyataan Michael B Hoelman Senior Advuser International Senior Adviser International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bahwa perpres yang diterbitkan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah secara politik dalam dunia internasional dalam melaksanakan SDGs. Michael menambahkan bahwa perpres ini merupakan alat bantu dan daya ungkit untuk memastikan pembangunan dalam masa kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam memastikan pembangunan sesuai dengan janji Jokowi Widodo ketika berkampanye. (Saeno,2017)

Perpres ini berisikan dan memuat beberapa keputusan, diantaranya adalah Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, rencana aksi pembangunan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional dan daerah, sasaran, tujuan, pendanaan dan kelembagaan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia.

Jonna Damanik koordinator program SDGs dan UPR (*Universal PeriodicReview*) dari Organisasi Harapan Nusantara mengatakan bahwa kehadiran Perpres mampu memastikan tidak seorangpun tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan. Paradigma inklusifitas dalam keikutsertaan warga selayaknya menjadi dasar partisipasi warga yang

dimaksud dalam Perpres No 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs. Prinsip SDGs *leave no one behind* perlu menggunakan perspektif hak asasi manusia, sehingga partisipatif yang terbentuk tidak hanya sekedar melibatkan kelompok tertinggal namun juga melibatkan mereka dalam dialog pembangunan. Hal senada juga disampaikan oleh Lia Toriana, Deputy Program Transparansi Internasional Indonesia, menurutnya Perpres ini dapat menciptakan keadilan baik secara substansial maupun prosedural dan mampu mendorong adanya akuntabilitas pembangunan serta ruang partisipasi bagi warga dalam pembangunan terutama kaum perempuan dan disabilitas yang kerap ditinggalkan. (www.sdg2030indonesia.org, 2017)

Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care, menakankan perlibatkan semua pihak harus diimplementasikan di tingkatan pemerintah baik nasional hingga ke daerah-daerah. Indri Oktaviani, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia menuturkan bahwa kelompok-kelompok sipil telah menungu kehadiran perpres, untuk menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi TPB bersama dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu Perpres perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah secara partisipatif. (www.sdg2030indonesia.org, 2017)

Namun setelah 2 tahun hingga saat ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs memandang bahwa sejak hadirnya Perpres 59 tahun 2017, tidak ada kemajuan yang signifikan dilakukan Indonesia untuk melaksanakan SDGs. Michael Bobby Hoelman yang sebelumnya berpendapat bahwa perpres SDGs merupakan jalan untuk melaksanakan SDGs namun

setelah diterbitkan perpres tersebut terkesan pelaksanaan SDGs di Indonesia seperti jalan ditempat. Indikasinya adalah ketidakjelasan pembentukan Tim Koordinasi Nasional SDGs sebagai mandat dari perpres tersebut. Ketidakjelasan ini memunculkan keraguan akan keberhasilan Tim Koordinasi Nasional mewujudkan prioritas presiden untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan disparitas. Dengan ketidakjelasan ini berdampak pada pemerintah daerah dalam menggunakan pendekatan yang sama dalam melaksanakan SDGs. (www.sdg2030indonesia.org, 2017)

D. Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan SDGs

Proses Perumusan SDGs tidak terlepas dari masukan ataupun aspirasi dari pemerintah daerah. Melalui asosiasi kota dan pemerintah daerah di tingkat global, peran pemerintah sangat aktif dalam ikut andil dalam perumusan dan pengesahan SDGs. Maka muncul slogan bagi pemerintah daerah yakni 'SDGs adalah kita'. Hal ini menunjukkan peranan penting pemerintah kota dan kabupaten dalam mewujudkan agenda pembangunan SDGs diseluruh dunia. (Hoelman, 2015)

Dalam konteks Indonesia, SDGs dapat menjadi momentum yang baik bagi kepala daerah dan birokrasi daerah, jika melaksanakan dan meraih tujuan dengan baik selama target SDGs yakni 15 tahun kedepan. Dikarenakan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam SDGs dapat menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini menjadi masalah dipemerintah daerah yakni ketertinggalan, kemiskinan dan korupsi. Hal ini ditambahkan oleh Diah Indrajati Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bahwa pada tingkat pemerintah daerah program-program orientasi kepada kepala daerah dan DPRD

mengenai kebijakan-kebijakan strategis ditingkat nasional memuat tujuan pembangunan berkelanjutan harus diaktualisasikan dan dilaksanakan di daerah karena pembangunan berkelanjutan dimaknai dan dipahami sebagai suatu pembangunan yang fokusnya untuk pemenuhan hak-hak masyarakat. (AR, 2017)

Sejak SDGs disahkan tahun 2015, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten diyakini berperan sentral dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Hal tersebut dilandasi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan dana yang dapat melakukan berbagai inovasi dan tumpuan penyediaan layanan publik serta kebijakan dan program-program pemerintah lainnya. Beragam keunggulan peran pemda tersebut dapat digunakan sebaik mungkin dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Hal ini menjadi salah satu evaluasi dari kegagalan MDGs di Indonesia yakni peran pemda yang tidak mampu mengoptimalkan tujuan dari MDGs. (SDGs.org, 2016)

Seluruh tujuan dan target SDGs secara langsung ataupun tidak, sangat terkait dengan kerja-kerja pemda baik tingkatan kota dan kabupaten. Meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan SDGs menjadi sebuah tantangan tersendiri. Terlebih bagi Indonesia yang memiliki 500 kota dan kabupaten yang masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda baik secara politik, ekonomi, sosial dan geografis. Namun terdapat beberapa faktor yang membuat pelaksanaan SDGs di daerah dapat berjalan dengan baik, yakni pertama adanya komitmen politik di tingkat lokal, kedua adanya birokrasi ditingkat lokal yang mampu menterjemahkan dan mengoperasionalkan SDGs dan terakhirnya adanya kelompok masyarakat (LSM) yang kuat ditingkat lokal. (SDGs.org, 2016)

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa daerah yang melaksanakan program SDGs kedalam program prioritas pembangunannya diantaranya adalah, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Boyolali. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Daerah-daerah yang Menjadi Implementasi Tujuan SDGs

Daerah yang mengadopsi SDGs	Poin SDGs	Kebijakan/Program.
Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan 2. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan disegala usia 3. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua 4. Mencapai kesetaraan gender 5. Menurunkan ketimpangan 6. Melestarikan samudra dan sumber daya kelautan 	Melalui Deklarasi Pangkep
Kota Prabumulih Sumatera Selatan	Energi bersih dan terjangkau	Program gas rumah tangga
Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan 2. Pendidikan berkualitas 	Program Desa Sehat dan Cerdas

Sumber : Di olah dari berbagai sumber

1. Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan

Kabupaten Kepulauan Pangkajene Kepulauan (Pangkep) merupakan wilayah yang penting untuk mendapatkan perhatian khusus untuk penerapan SDGs. ada 6 tujuan prioritas SDGs yang menjadi prioritas di Kabupaten Pangkep, prioritas pertama adalah menghapus segala bentuk kemiskinan, kedua menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk disegala usia. Ketiga menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Keempat mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kelima menurunkan ketimpangan dan terakhir melestarikan samudra dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. (Madjid, 2017)

Kabupaten singkap memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yakni sekitar 16,38 % dan angka tersebut jauh melampaui angka kemiskinan nasional sebesar 11 %. Sebagai wilayah yang tingkat kemiskinan tinggi dan juga mengalami ketimpangan karena sebagai wilayahnya adalah kepulauan terpencil. Hal ini ditambahkan oleh Abdurrahman perwakilan BAPPEDA Kab Pangkep bahwa Pangkep merupakan daerah gugus kepulauan dengan tingkat kemiskinan tertinggi diIndonesia

Dalam hal pendidikan, pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Pangkep yang tidak tamat SD masih tinggi yakni 21,04 % jumlah

tersebut didominasi oleh perempuan yang tidak tamat SD. Ketimpangan gender ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya adalah pembagian kerja yang tidak setara dalam rumah tangga. Data lain yang relevan dengan tujuan SDGs adalah tingginya angka pernikahan anak dibawah 16 tahun mencapai 22,67 %.

Direktur Kapal Perempuan Misiya menuturkan bahwa banyak diskriminasi dan ketimpangan yang dialami oleh perempuan dalam segala aspek kehidupan di daerah kepulauan. Misalnya masih berlakunya budaya-budaya diskriminasi yang menyebabkan perkawinan dibawah umur, putus sekolah, rendahnya kualitas kesehatan reproduksi perempuan bahkan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu pada umumnya tingkat partisipasi masih rendah karena perempuan dianggap tidak mampu terlibat dalam pengambilan keputusan yang penting, dengan hal tersebut diperlukan upaya yang keras untuk melakukan pemberdayaan perempuan miskin dan menghasilkan program pemerintah menjadi responsif gender di wilayah kepulauan. (Hasyim, 2017).

Dalam hal sanitasi penduduk yang mendapat air bersih baru sekitar 53,91 % dan yang lain bergantung pada air kemasan yang terus meningkat ketergantungannya hingga 37,69 % pada tahun 2014. (Panuluh dan Fitri, 2016).

Agenda SDGs dianggap mampu menjembatani berbagai permasalahan yang ada di Pangkep. Pembangunan yang partisipatif dan inklusif terutama sasaran

pemerintah daerah Pangkep dalam mengadopsi SDGs. Pada tanggal 1 Juni 2016 Kabupaten Pangkep menyatakan wilayahnya berkomitmen melaksanakan SDGs dalam wujud dekralasi atau dikenal dengan Deklarasi Pangkep. Dalam dekralasinya, Pangkep menyatakan untuk melaksanakan SDGs melalui kemitraan yang setara dan tanpa meninggalkan seorangpun. Diantara persoalan-persoalan yang menjadi perhatian untuk diatasi adalah tentang mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan gender, penghapusan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. (Panuluh dan Fitri,2016).

2. Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Kota Mandiri Hemat Energi)

Kota Prabumulih tumbuh dari kota pengeboran minyak dan gas bumi. Cadangan minyak dan gas bumi dikota ini banyak dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi termasuk Pertamina. Meskipun kaya akan sumberdaya alam namun Prabumulih tergolong daerah dengan APBD terendah di Sumatera Selatan. Dengan keadaan seperti itu Pemerintah Kota mulai melakukan terobosan dengan membangun program gas rumah tangga. Upaya ini dilatarbelakangi oleh krisis energi terutama pada kurun 2007-2008 ketika pemerintah ingin mengkonvensi dari minyak tanah ke tabung elpiji dan langkanya tabung elpiji. Padahal, Kota ini merupakan salah satu penghasil gas bumi terbesar. Pada awalnya Pemerintah Kota mulai memasang jaringan gas bagi 4650 rumah tangga. Lima tahun

kemudian program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hingga kini sekitar 20 % rumah tangga di Prabumulih telah terjangkau layanan ini.

Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kota menerapkan teknologi informatika. Setiap rumah tangga dapat memanfaatkan media daring dan bank daerah untuk melakukan pembayaran tagihan. Pemerintah Kota berambisi seluruh rumah tangga dapat menikmati layanan ini, dan upaya pengimplementasian kebijakan ini diharapkan membuat Kota Prabumulih menjadi kota mandiri dan hemat energi. (Hoelman, 2015) Hal ini selaras dengan tujuan SDGs yakni pada poin ketujuh yakni Energi bersih dan terjangkau, Memastikan akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

3. Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui bupatinya Suyoto berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di daerahnya. hal tersebut disampaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh World Bank bekerjasama dengan kedutaan besar Kanada, Swiss dan Uni Eropa. Bupati Suyoto mengatakan sangat antusias menyambut agenda pembangunan SDGs. Komitmen pemerintah Bojonegoro itu meliputi kehidupan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, tanpa ketidakadilan dan tanpa kesenjangan dalam pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan adanya keseimbangan lingkungan dan alam dan pemerintah Bojonegoro berfokus pada pengembangan

sumberdaya manusia, penguatan infrastruktur yang sangat signifikan pada ekonomi dan penyiapan fiskal. (Tribunnews.com, 2016)

Kabupaten Bojonegoro juga telah memiliki aturan pelaksanaan SDGs di daerahnya yakni keputusan Bupati Nomor 188/1171/KEP/412.11/2016 tentang Gugus Tugas Pelaksana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bojonegoro. Bahkan peraturan ini terbit terlebih dahulu daripada peraturan presiden namun jika perpres terbit maka peraturan daerah ini akan disesuaikan kembali dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pusat dan penguatan regulasi tersebut akan dimuat dalam RPJMD Bojonegoro (Panuluh dan Fitri, 2016).

Keberhasilan Pemerintah Bojonegoro dalam melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan diapresiasi oleh panitia kerja (Panja) *sustainable Development Goals* (SDGs) Badan Kerjasama antar Parlemen (BKAP) hal ini dikarenakan Kabupaten mempunyai dua program yang terkait dalam SDGs yang sangat baik, yaitu desa sehat dan desa cerdas. (Tribunnews.com, 2016) program ini sesuai dengan poin 3 dan 4 yakni Kehidupan sehat dan sejahtera dan pendidikan berkualitas. Bahkan pada saat ini pemerintah Bojonegoro mempunyai rencana taktis dalam mempersiapkan SDGs yaitu dengan bekerjasama dengan NGO yang dipercaya sebagai mitra PBB dan BAPPENAS yaitu INFID dan juga dengan World Bank serta pemangku kepentingan di Bojonegoro. Dengan kerjasama tersebut dapat memberikan masukan yang holistik agar pemerintah dapat

memandangkan pencapaian yang telah dicapai dan belum dicapai serta monitoring pelaksanaan SDGs di Bojonegoro. Pelaksanaan SDGs di Bojonegoro diharapkan dapat mensejahterkan masyarakat Bojonegoro dan generasi masa depan manusia Bojonegoro, terlindunginya sumberdaya alam untuk masa depan Bojonegoro bagi Indonesia dan dunia. (Junaidi, 2016)

Dodi Riyarmadji, Plt kepala Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bahwa kepala daerah mampu menjadi sumber inspirasi guna mendorong meluasnya praktik inovatif didaerahnya masing-masing dengan mekanisme dan tindakan yang harus dilakukan dalam mendorong implementasi SDGs di wilayahnya. Hal ini ditambahkan oleh Erna Witoelar, Pendiri Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (YIPD) kita harus bekerja dengan cara inovatif dan berkelanjutan melalui pendekatan aneka pemangku kepentingan guna mencapai seluruh tujuan dan terget SDGs, terutama kemiskinan. (AR, 2017). Dengan melibatkan semua pemangku kebijakan salah satunya pemerintah daerah dapat mewujudkan tujuan SDGs ditataran masyarakat dengan baik.

E. Tantangan dan Kendala Implementasi SDGs Di Indonesia

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya akan memiliki tantangan dan hambatan. Begitu pula dengan mengimplementasikan SDGs di Indonesia. Dari segi proses pelaksanaan SDGs ditingkat nasional juga masih meninggalkan permasalahan seperti mekanisme akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non

pemerintah dan juga proses partisipasi itu sendiri. Ada beberapa tantangan dan hambatan pelaksanaan SDGs di Indonesia. diantaranya adalah

Pertama, rendahnya kesadaran dan pemahaman dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam masyarakat ataupun lembaga pemerintah, dapat dilihat sampai pada saat ini penerapan SDGs masih terkesan jalan ditempat. hal ini di karenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam penerapan SDGs dikalangan masyarakat. faktor rendahnya kesadaran dan pemahan pelaksanaan SDGs di Indonesia, karena pada saat ini sosialisasi Indonesia masih dalam pendekatan yang kurang partisipatif walapun tujuan-tujuan dari SDGs sudah terintegrasi dalam rencana pembangunan negara.

Kedua, masalah geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan letaknya berjauhan satu dengan lainnya. Ketimpangan baik ekonomi dan pembangunan menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Karakteristik yang berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lain menjadi tantangan dalam Implementasi SDGs dikarenakan setiap daerah harus memiliki pendekatan berbeda dalam mewujudkan poin-poin SDGs didaerahnya ditambah pemerintah daerah memiliki sumberdaya dan kapitas yang terbatas dalam mewujudkan SDGs. dengan keterbatasan dan karakteristik berbeda disetiap daerah membuat pelaksanaan SDGs terhambat didaerah-daerah yang seharusnya menjadi fokus dalam implementasi SDGs. hal ini mengakibatkan melorotnya peringkat Indonesia sebagaimana yang dilaporkan oleh SDSN (*Sustainable Development Solution Network*) SDG Index and Dashboards yang mengatakan bahwa peringkat Indonesia trurun dari urutan ke 98 dari 149 negara pada tahun 2016 menjadi peringkat ke 100 dari 157 negara pada tahun 2017. Dan bahkan di antara negara-

negara anggota G20, Indonesia hanya sedikit lebih tinggi dari Arab Saudi, Afrika Selatan dan India serta di kawasan ASEAN, peringkat Indonesia berada dibawah Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam dan Filipina. (Saeno, 2017).

Ketiga, masalah pendanaan. SDGs memiliki 17 tujuan yang mana dalam tujuan-tujuan tersebut dipecah menjadi 169 target pelaksanaannya, dengan target yang banyak maka akan membutuhkan pendanaan yang besar untuk merealisasikannya. Dalam konteks Indonesia sendiri pendanaan pelaksanaan SDGs bersumber dari APBN dan dana-dana yang tidak terikat lainnya, walaupun menurut masalah pendanaan telah diatur dalam Perpres namun menurut Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care hingga saat ini belum ada data ataupun analisa dari pemerintah berapa besar dana yang dibutuhkan Indonesia dalam mencapai SDGs di tahun 2030. (Saeno, 2017)

Dengan tantangan-tantangan yang telah dijelaskan diatas seharusnya tidak perlu dianggap sebagai beban melainkan tantangan yang ada harus dihadapi untuk meningkatkan kinerja bagi akselerasi pembangunan nasional Indonesia hingga 2030 Oleh karena itu pelaksanaan SDGs di Indonesia membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah saja yang berperan aktif dalam pencapaian SDGs namun juga keterlibatan masyarakat, swasta dan LSM. Keterlibatan unsur-unsur sipil tersebut dapat memecahkan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Indonesia terutama pada pembangunan. Keterlibatan peran daerah-daerah, organisasi sipil termasuk perguruan tinggi atau universitas membawa keyakinan bahwa SDGs akan dilaksanakan dengan prinsip inklusif dan partisipatoris.